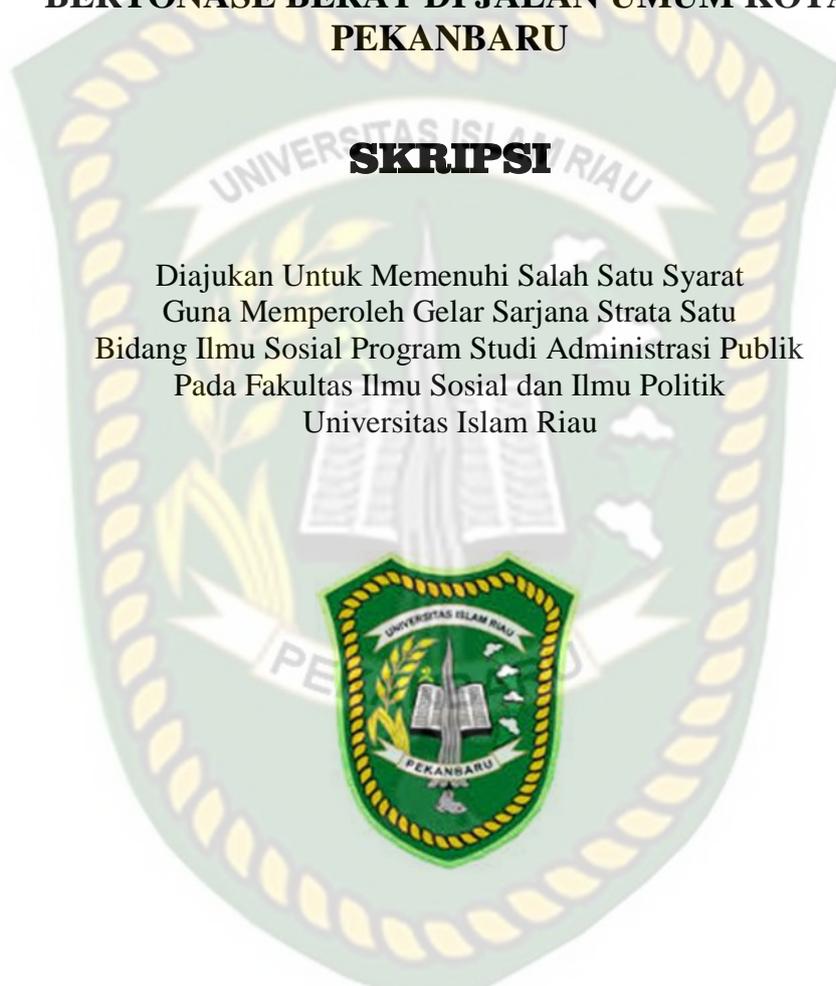


YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP TRUK
BERTONASE BERAT DI JALAN UMUM KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MOUNDI KUSUMA DEWI

157110716

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT , atas segala rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak yang membantu. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si., selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hendry Andry S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing II dan yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

5. Seluruh staff, Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Teristimewa kepada Ayah Bambang Supriyanto dan Ibu Kusriyani yang sangat saya cintai yang telah berjasa membersarkan, membimbing, serta senantiasa mendoakan saya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi ini. Juga kepada abang dan adik-adik tersayang serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Kepada sahabat sejati saya Monica Divia, Winona, Anggi Sacita dan Dini Rizki yang telah memberikan semangat dan dukungan serta menghibur saya disaat saya lelah.
8. Kepada teman-teman Administrasi Publik seperjuangan saya Alvin Arighi, Andre Deri dan Herry terimakasih atas kebersamaannya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas bantuan yang diberikan para pihak, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Pekanbaru, November 2019

Moundi Kusuma Dewi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Administrasi.....	14
2. Konsep Organisasi	15
3. Konsep Manajemen.....	17
4. Konsep Pengawasan.....	20
5. Penertiban.....	29
B. Kerangka Pikir	31
C. Hipotesis.....	33
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel.....	34
F. Teknik Pengukuran	36
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Teknik Penarikan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Jadwal Penelitian.....	44
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
A. Sejarah Ringkas.....	47
B. Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan	51
C. Fungsi dan Tugas Organisasi	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Identitas Responden	78
B. Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru	81
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru	95
BAB VI KESIMPULAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

I.1	Tabel Jumlah Truk yang Terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	5
I.2	Rute Truk Bertonase Berat Pada Jalan Umum di Kota Pekanbaru.....	7
I.3	Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Truk Beronase Berat Tahun 2016-2017.....	9
I.4	Pelanggaran dan Sanksi Lalu Lintas Kendaraan Truk Bertonase Berat Tahun 2017.....	10
II.1	Konsep Operasional Variabel Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.....	35
III.1	Sampel pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	40
III.2	Jadwal Penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru	44
IV.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2016.....	48
IV.2	Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2015.....	50
V.1	Identitas Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Umur.....	79
V.2	Identitas Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
V.3	Identitas Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	80
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.....	83
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Melakukan Penilaian Terhadap Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.....	87
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator	

Mengadakan Tindakan Perbaikan Terhadap Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru 90

V.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru..... 93



DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	31
IV.1	Struktur Organisasi	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru 101
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru 107
3. Rekapitulasi Telly Kuesioner Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... 112
4. Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru 114



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moundi Kusuma Dewi
NPM : 157110716
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2019

Pelaku Pernyataan,



Moundi Kusuma Dewi

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP TRUK BERTONASE BERAT DIJALAN UMUM KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Moundi Kusuma Dewi

Kata Kunci : Pengawasan dan Truk Bertonase

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru. Dimana yang menjadi tolak ukurnya ada 3 indikator, yaitu : Menetapkan Standar, Melakukan Penilaian, Mengadakan Tindakan Perbaikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu dengan wawancara dan berinteraksi dengan orang di tempat penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik kuesioner , wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup Terawasi”. Adapun faktor penghambatan dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah Kemampuan Pelaksanaan Pengawas, Sarana dan Prasarana, Koordinasi.

***SUPERVISION OF RELATIONSHIP DEPARTMENT OF HEAVY TRANSPORT
TRUCKS IN PUBLIC CITY OF PEKANBARU CITY***

ABSTRACT

Moundi Kusuma Dewi

Keywords: Monitoring and Trucks with Tonnage

This research aims to find out how the Supervision of Transportation of Heavy Tiers in the Public Road where there are 3 indicators, namely Conducting Action used in research. This is a quantitative method that is by interviewing and interacting with people at the research site. This research can be categorized as a descriptive research that is prioritizing the questionnaire list as a data collection tool and the data collected then becomes the main raw material for Pekanbaru City Trucks Setting Standards, Conducting Assessments, Improvements: Methods for empirical conditions of objectivity analyzing the existence of research objectives at the location studied Location this research is at Pekanbaru City Transportation Department. Types and data collection techniques used in this study consisted of primary data collected by interview and documentation questionnaire techniques and secondary data collected using observation techniques. The results of this study conclude that overall the Supervision of the Department of Transportation Against Heavy Tonnage in the Public Street of Pekanbaru City is in the category of "Fairly Supervised". The inhibiting factor in the implementation of this supervision is the Ability to Implement Supervisors, Facilities and Infrastructure, Coordination.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekanbaru merupakan kota yang tidak lepas dari segala bentuk perkembangan dari berbagai aspek seperti peningkatan pembangunan, pendidikan, investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu dikatakan sebagai kota metropolitan. Dimana penduduk sebagai penikmat sarana dan prasarana yang telah disediakan dari berbagai jenis dan bentuk dari pembangunan. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan transportasi.

Secara geografis letak Kota Pekanbaru sangatlah strategis sebagai ibukota Provinsi Riau dan sebagai kota dengan salah satu visi sebagai pusat perdagangan di Provinsi Riau. Selain itu, Kota Pekanbaru merupakan lintas arus barang dan orang yang cukup ramai. Seiring perkembangan kota Pekanbaru maka transportasi akan meningkat. Hal ini menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi dalam perkotaan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan peparkiran, dan perambuan lalu lintas. Arus lalu lintas yang identic dengan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap lumrah bagi masyarakat terutama di wilayah kota Pekanbaru.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, prasarana lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dalam arti lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun tujuan dari pengaturan lalu lintas yaitu keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang dilakukan antara lain yaitu dengan:

1. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan jaringan jalan.
2. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan intra dan antra moda.
4. Mengatur penyediaan jasa-jasa angkutan yang mengangkut dengan muatan, alat angkut dan biaya-biaya operasi kendaraan guna efisiensi transportasi lalu lintas.

Dalam peraturan yang dimuat maka masalah penertiban truk bertonase ini termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan. Dinas yang mengatur urusan perhubungan, informatika dan komunikasi adalah Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Perhubungan dan infokom, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah di bidang Perhubungan dan Infokom, Dinas mempunyai tugas melaksanakan sejumlah usaha dan kegiatan otonomi daerah di bidangnya dan melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, informatika dan komunikasi.

Pada pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan dan Infokom. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Perhubungan dan Infokom.
2. Penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan dan Infokom.
3. Penyusunan hasil penataan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang Perhubungan dan Infokom.
4. Penyusunan standar pelayanan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Penyusunan program diklat SDM / aparatur yang meliputi teknis, fungsional, keterampilan dan kejujuran.
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pembinaan perizinan.
7. Pembinaan kebijaksanaan Perhubungan dan Infokom yang di tetapkan kepala daerah.
8. Penyelenggaran usaha pengelolaan di bidang Perhubungan dan Infokom.
9. Pengelolaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, dan perlengkapan dinas.
10. Pengelolaan cabang dinas dan UPTD.

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat telah memunculkan kendaraan dengan daya angkut yang terus meningkat, sedangkan kondisi prasarana jalan umum belum sepenuhnya mendukung, demikian juga masih tingginya angka pelanggaran muatan lebih oleh kendaraan angkutan barang yang merupakan salah satu faktor penyebab dari kerusakan jalan. Persoalan tersebut sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya pergerakan sistem primer, khususnya yang berkaitan dengan sistem distribusi barang dari luar kota kedalam kota, sehingga pergerakan dalam kota berbaur dengan pergerakan luar kota.

Oleh karena itu untuk memperkecil persoalan lalu lintas dalam kota ini, ruas jalan dalam kota harus di bebaskan dari pergerakan angkutan barang dalam kota yang umumnya menggunakan truk besar. Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan penertiban penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan muatan bertonase berat.

Truk bertonase berat adalah angkutan barang yang membawa hasil industri seperti pertambangan, perkebunan dll. Truk merupakan sebuah transportasi yang juga termasuk kategori alat berat. Truk adalah kendaraan angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Truk besar tersebut tidak hanya berasal dari luar kota pekanbaru, melainkan dari dalam kota pekanbaru. Truk bertonase berat tersebut memiliki berbagai kepentingan seperti mengantarkan atau mendistribusikan barang dari luar ke dalam kota pekanbaru. Adapula yang hanya sekedar melintas jalan dalam kota sebagai jalur lintas untuk mendistribusikan barang ke kota lainnya. Berikut dapat dilihat jumlah truk bertonase berat yang terdaftar di Kota Pekanbaru.

Tabel I.1 Tabel Jumlah Truk yang Terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

No	Jenis kendaraan	Tahun	
		2016	2017
1.	Truk bertonase berat aktif	1.184	1.815
2.	Truk bertonase berat tidak aktif	1.532	1.249
Jumlah		2.716	3.064

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018.

Larangan truk bertonase berat melintas di dalam kota Pekanbaru tidak hanya di fokuskan terhadap truk bertonase berat yang dari luar kota menuju dalam kota, melainkan truk yang basal dari dalam kota sendiri juga di tetapkan larangan melintas sesuai dengan aturan lalu lintas ataupun rambu-rambu yang telah di tetapkan dan di pasang.

Meningkatnya truk bertonase berat banyak menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Bagian yang menyinggung keselamatan adalah seperti banyak timbulnya kecelakaan serta kenyamanan dalam berlalu lintas seperti kerap terjadinya kemacetan di jalan raya. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan dari pihak terkait dalam melakukan penertiban serta rendahnya kesadaran pemngemudi untuk mematuhi peraturan menjadi faktor pendukung permasalahan. Pelanggaran dapat terjadi karena seangaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun pura-pura tidak tau akan ketentuan peruntukan jalan.

Penertiban merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tetapi infrastruktur sepeti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai yang di harapkan.

Guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum, maka dilakukan rute khusus jalan umum bagi angkutan kendaraan bertonase berat (truk) atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 tonase keatas. Berikut rute jalur khusus pada jam tertentu kendaraan bertonase atau bermuatan 5 ton lebih.

Tabel I.2 Rute Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru

No	Kedatangan (Pintu Masuk)	Tujuan	Rute
1.	Barat	- Arah Timur Kota Pekanbaru - Arah Utara Kota Pekanbaru	- Jalan Kubang Raya - Jalan Kaharudin Nasution - Jalan Pasir Putih - Jalan Garuda Sakti - Jalan Air Hitam - Jalan Siak II
2	Utara	Arah Barat Kota Pekanbaru	- Jalan Siak II - Jalan Air Hitam - Jalan Garuda Sakti
3	Timur	Arah Barat Kota Pekanbaru	- Jalan Raya Pasir Putih - Jalan Kaharudin Nasution - Jalan Kubang Raya
4	Selatan	- Arah Barat Kota Pekanbaru - Arah Timur Kota Pekanbaru	- Jalan Kubang Raya - Jalan Soebrantas - Jalan Raya Pasir Putih - Jalan Pangkalan Baru

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan peraturan dimana truk bertonase tidak dibenarkan masuk ke dalam kota. Adapun klasifikasi truk yang dilarang masuk kedalam kota adalah truk yang memiliki tonase melebihi 8 ton. Penetapan angka tonase tersebut berdasarkan kelas jalan nomor II yang hanya mampu dilewati truk bertonase 8 ton. Sebagaimana juga di tentukan dalam Pasal 199 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk pengawasan dan pengendalian lalu lintas maka diberlakukan lintasan kendaraan muatan diatas 5 tonase boleh melalui lintasan jalan umum tersebut (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 199 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1. Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan untuk itu.
2. Setiap kendaraan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan kecuali telah mendapat izin.

Ketika suatu peraturan telah ditetapkan maka sebaiknya harus diikuti dengan tindakan. Dinas Perhubungan sebagai implementer kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan raya dibantu oleh Satuan Polisi Lalu Lintas memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tata tertib berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Adapun tugas dari kedua instansi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan sebagai fasilitator dan pemberi keputusan dimana mereka memiliki peran yang sangat penting dalam penertiban truk bertonase berat.
2. Satlantas sebagai penggerak atau implementaor keputusan yang diberikan Dinas perhubungan dimana mereka berkoordinasi untuk meminimalisir truk betonase berat melintas didalam kota.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibantu oleh Satuan Polisi Lalu Lintas yang bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Sudah melakukan berbagai program guna terciptanya ketertiban lalu lintas, namun hal tersebut belum dirasakan efektif dan optimal dengan melakukan pengawasan melalui program razia. Pengendalian dan pengawasan juga terasa belum optimal. Beberapa titik rawan pelanggaran lalu lintas sering kali tidak mendapatkan

pengawasan sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan terjadinya kecelakaan. Berikut pelanggaran lalu lintas angkutan barang truk bertonase berat di jalan umum di kota Pekanbaru.

Tabel I.3 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Truk Beronase Berat Tahun 2016-2017

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	
		2016	2017
1	Kelebihan Muatan	98	89
2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	2	2
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	15	14
4	Izin Usaha Angkutan	1	1
5	Izin Trayek	-	3
6	Parkir / rambu-rambu	7	4
Jumlah		123	113

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel I.3 di atas dapat dilihat terjadi penurunan angka pelanggaran sebesar 10 pelanggaran. Dimana pada tahun 2016 tercatat pelanggaran sebanyak 123 pelanggaran dan pada tahun 2017 terdapat 113 pelanggaran. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran dapat dikenakan sanksi ditempat berupa pembongkaran muatan dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan, pencabutan izin operasi dan/atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha.

Berdasarkan data jenis pelanggaran kendaraan truk bertonase berat, maka terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terdata (tabel I. 3), antara lain, meliputi kelebihan muatan, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji, izin usaha angkutan, dan izin trayek.

Tabel I.4 Pelanggaran dan Sanksi Lalu Lintas Kendaraan Truk Bertonase Berat Tahun 2017

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Jenis Sanksi
1	Kelebihan Muatan	89	Denda
2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	2	Denda dan Penangguhan Operasi Jalan
3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	14	Penangguhan Operasi Jalan
4	Izin Usaha Angkutan	1	-
5	Izin Trayek	3	Penangguhan Operasi Jalan
6	Parkir / rambu-rambu	4	Denda
	Jumlah	113	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Dari table I.4 diatas, dapat digambarkan bahwa setiap kendaraan yang terjaring dan melakukan pelanggaran hanya dikenakan sanksi berupa; denda bagi pelanggaran kendaraan truk melebihi muatan kendaraan, dan penangguhan operasional jalan dan kendaraan tidak dapat melakukan operasional di jalan selama ketentuan dan persyaratan belum terpenuhi oleh pemilik kendaraan.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengawasan truk bertonase besar di jalan umum di Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Masih adanya truk bertonase berat yang melintas di jalan umum pada waktu yang dilarang untuk melakukan lintasan (pukul 21.00 wib s/d 06.00 wib) padahal sudah ada pengelompokan jalan menurut kelas jalan yang dapat

dilalui dan tidak dapat dilalui sesuai menurut pasal 19 ayat 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009.

2. Masih teridentifikasi belum adanya tindakan tegas terhadap truk bertonase berat yang masuk ke jalan umum Kota Pekanbaru, padahal sudah ada peraturan pada pasal 282 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Di duga belum optimalnya kegiatan pengawasan yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satlantas kota Pekanbaru sehingga truk masih bisa masuk ke jalan umum kota sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan Umum Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan, yakni ilmu Administrasi Publik, khususnya ilmu dibidang pengawasan. Dan sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan bisa dijadikan bahan masukan khususnya bagi Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pekanbaru dan sebagai koreksi bagi pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial yang defenisinya tidak terbatas. Administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaihan) kegiatan usaha kerja sama sekelompo orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Sebagai proses administrasi menggambarkan berjalannya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan konsep administrasi dalam arti sempit yakni sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Siagian (2007;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara teoritik pengertian administrasi melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris “administer” yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari Ad dan Minisrare yang berarti “to serve” melayani, membantu dan memnuhi. Lebih jelas lagi kata Ad artinya intensif sedangkan Ministre berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan (Sagala, 2007;40)

Admosudirjo dikutip (Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan yang berlangsung didalamnya.

Selanjutnya Zulkifli (2005;24) menyatakan:

Administrasi bertitik tolak dari teoritas batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerja sama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak unruk menciptakan efektifitas dan efesiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi;

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human relation
- f. Informasi
- g. Sumber daya

Dengan demikian administrasi adalah proses rangkaian kegiatan usaha kerja sama yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *orgonon* dan istilah latin *orgonum* yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Dalam literatur sampai saat ini menurut Hamim dan Indra Muchlis Adnan (2005;13-14), arti organisasi beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:

- a. Dwight Waldo: Organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu system administrasi.
- b. Jhon M. Gaus: organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
- c. G.R. Terry: Organisasi berasal dari kata *organism* yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.
- d. Leonard D. White: Organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal oleh hukum dan oleh top manajemen. Organisasi adalah sejumlah tatakerja (work relationship) yang terjelma dari hubungan kerjasama antara sejumlah orang dalam jangka waktu yang panjang.
- e. Herbert A. Simon: organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia.

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Gitosudarmo (2000;1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Gomes (2003;23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang

dipergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjaadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan.

Selanjutnya menurut Siagian (2003;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok yang disebut bawahan.

3. Konsep Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata “manus” yang berarti tangan dan “agare” yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja “managere” yang artinya menangani. Managere diterjemahkan kedalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan, (Usman, 2008:4).

Menurut Syamsu (2000:25), Manajemen adalah suatu seni untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dengan usaha yang maksimal guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang maksimal baik bagi pimpinan maupun para karyawan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Menurut Setiawan (2004:25), Manajemen adalah pengelolaan terhadap proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2005:15), Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Handoko (2003:18), Manajemen adalah proses perencanaan, pengoorganisasian, memimpin serta mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Haiman dalam Manullang (2001:3), mengatakan manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu, untuk mencapai tujuan bersama. Sementara Winardi (2000:24), mengungkapkan manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik pengetahuan umum, maupun keahlian dan yang diakui secara beruntun dan dalam rangka usaha dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian dalam Torang (2013:166) mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Dapat pula digambarkan bahwa manajemen merupakan usaha kerja sama sekelompok orang dan bukan hanya kerjasama yang dilakukan oleh satu orang.

Menurut Sarwoto (2002:120), mengemukakan manajemen dan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yaitu proses penetapan tujuan, cara pelaksanaan atau strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian, yaitu proses pengaturan dan alokasi pekerjaan, kewenangan dan sumber daya yang ada pada anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.
- c. Kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi orang-orang dalam organisasi, agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, dengan memotivasi bawahan.
- d. Pengawasan, yaitu proses untuk mengetahui apakah aktifitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Menurut Brantas (2009:4), berpendapat manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Dalton dalam Brantas (2009:7), mengemukakan manajemen merupakan suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia.

Menurut Tangkilisan (2005:55), Pelaksanaan manajemen dapat diukur dari unsur-unsur atau sumber-sumber manajemen itu sendiri, yakni :

- a. Man/manusia.
- b. Money/uang.
- c. Material/perlengkapan.
- d. Machine/mesin.
- e. Metode/cara.
- f. Market/pasar.

Menurut Terry (2009:1), Manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Iskandar (2005:5), berpendapat bahwa pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan dan perencanaan ulang, agar tujuan program tersebut dapat tercapai secara efisien

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang maksimal baik bagi pimpinan maupun para karyawan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

4. Pengawasan

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Oleh karena itu, di bawah ini akan di uraikan konsep mengenai pengawasan.

Menurut Manullang (2008:172), Dalam Bukunya Dasar-Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan. pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni :

- a. Menentukan ukuran dan standar
- b. Penilaian pekerjaan yang dilakukan atau melakukan tindakan penilaian

- c. Pembetulan penyimpangan atau melakukan tindakan perbaikan (koreksi), dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Menurut Terry (2009:395), mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti sebagai suatu tindakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerja dan jika diperlukan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto, 2004:12).

Menurut Winardi (2000:161), terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan :

- a. Sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda, (maka dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja ke arah sasaran-sasaran organisatoris).
- b. Pengawasan diperlukan, disebabkan oleh karena terdapat adanya satu keterlambatan antara waktu dan sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut Strong dalam Brantas (2009:189), menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan,

agar suatu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana. Menurut Brantas (2009:1997), pengawasan adalah proses pemantauan penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan dalam suatu kegiatan atau program meliputi proses atau langkah-langkah sebagai yaitu :

- a. Menetapkan standar-standar kinerja yang akan digunakan dasar pengawasan.
- b. Menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

Selanjutnya Brantas (2009:191), menjelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Suatu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi).
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
- d. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- e. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- f. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi.
- h. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i. Memberi opini atas kinerja organisasi.
- j. Mengerakkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
- k. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Menurut Siagian (2006:93), ada dua macam bentuk pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan langsung (DirectControl)

Pengawasan langsung adalah pengawasan dengan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :

- a) Inspeksi langsung.
- b) On-the-spot observation.
- c) On-the-spot report.

b. Pengawasan tidak langsung (IndirectControl)

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung ini dapat berbentuk :

- a) Tertulis.
- b) Lisan.

Berkenaan dengan bentuk dan teknik pengawasan tersebut, Siagian (2006:94), menjelaskan bahwa pengawasan langsung merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan laporan secara langsung. Dalam bentuk pengawasan ini, pengawas langsung turun ke lapangan untuk melihat pegawai atau guru yang sedang melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang sudah ditetapkan.

Dalam pengawasan langsung, pengawas mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di lokasi dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Bentuk konkret pengawasan langsung diantaranya inspeksi langsung, observasi langsung dan menerima laporan langsung di tempat. Sedangkan teknik pengawasan tidak langsung adalah bentuk ataupun teknik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari jarak jauh atau secara tidak langsung dengan cara mempelajari laporan yang disampaikan

oleh pegawai, kepala sekolah, guru, dan lainnya. Laporan tersebut dapat dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Menurut Terry (2009: 395), mengemukakan pengawasan terdiri dari pada suatu proses yang dibentuk oleh macam langkah-langkah yang bersifat universal, yaitu:

- a. Mengukur hasil pekerjaan.
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan).
- c. Mengkoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Menurut Handoko (2003:361), mengklasifikasikan tipe pengawasan menjadi tiga tipe, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (feedforward control).
Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu selesai.
- b. Pengawasan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control).
Pengawasan ini, sering dilakukan selama sesuatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "double-check" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik (feedback control).
Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past – action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

Agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya.

Ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
- b. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilakukan.
- d. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- e. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
- f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien.
- g. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak betul.

Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan. oleh karena itu pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Surandjang (2005:240), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana.

Dilengkapi dengan pendapat Sastrohadiwirjo (2002:26), bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah diterapkan dan tahapan yang harus dilalui. Arti pentingnya pengawasan adalah :

- a. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- b. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugasnya.
- c. Pengawas diikut sertakan dalam melaporkan dan menyelidiki penyakit mengenai kerja dan membeberkan laporan dan saran-saran kepada pengurus.
- d. Pengawas ikut serta dalam indentifikasi penyimpangan kerja membuat suatu pengawas.

Ada beberapa asas-asas pengawas menurut Koont dan O'donell dalam Hasibuan (2005:243), yaitu:

- a. Pengawas harus ditunjukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lain diluar dugaan.
- c. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika pemimpin bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Ditujukan kearah pencegahan penyimpangan baik yang akan terjadi maupun yang sesudah terjadi, baik pada waktu sekarang maupun dimasa yang akan datang.
- e. Tehnik kontrol yang paling baik adalah mengusahakan adanya pemimpin bawahan yang berkualitas baik.
- f. Pengawasan harus dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
- h. Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan pemimpin.
- i. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

- j. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam organisasi.
- k. Efisien dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
- l. Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- m. Sistem pengawasan harus ditinjau berulang kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- n. Pengawasan dapat dilakukan, apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan planning, organising, staffing, dan directing.

Pengawasan ini secara tidak langsung juga sangat menghindarkan organisasi dari kesalahan yang besar yang dapat mengancam keberlangsungan hidup organisasi itu sendiri dan juga untuk meningkatkan keefektifan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Asas-asas ini menunjukkan bahwasanya pengawas bukanlah hal yang sepele yang dapat saja tidak dilakukan, melainkan sebuah aktifitas yang sangat mempengaruhi keoptimalan kinerja sebuah organisasi.

Langkah-langkah dalam pengawasan atau pengawasan menurut Herujito (2004:96), adalah:

- a. Menetapkan standar pelaksanaan dan metode (bisa berupa standar waktu, fisik/ kualitas atau standar keuangan).
- b. Mengukur prestasi kerja (dapat dilakukan melalui observasi, pengujian, atau laporan tertulis).
- c. Membandingkan standar dengan hasil atau pelaksanaan kegiatan, menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- d. Mengambil tindakan koreksi.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2005:242), tujuan pengawasan adalah:

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- c. Supaya tujuan dihasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut Silalahi (2003:176), menyatakan bahwa dalam pengawasan diperlukan langkah-langkah:

- a. Menentukan objek yang akan diawasi.
- b. Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau menggambarkan pengawasan atau menggambarkan pengawasan yang dihendaki.
- c. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan.
- d. Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan.
- e. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apa ada perbedaan.
- f. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti.

Adapun pelaksanaan pengawasan yang efektif menurut Handoko (2003:373), yaitu:

- a. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
- b. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
- c. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
- d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- e. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- f. Realistik secara Organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja nasional.
- h. Fleksibel. Pengawasan harus memiliki fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan dari luar.
- i. Bersifat sebagai petunjuk operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
- j. Diterima para anggota organisasi.

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengawasan menurut Darwis (2000:31), haruslah berpatokan pada prinsip-prinsip dari controlling tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Titik kontrol strategis, kontrol terbaik hanya bisa diperoleh apabila titik-titik kritis didefinisir dan perhatian khusus diarahkan pada penyesuaian titik-titik tersebut.
- b. Umpan balik, yakni proses penerapan informasi yang lalu terhadap kegiatan yang akan datang.
- c. Kontrol yang fleksibel, setiap sistem kontrol harus peka terhadap perubahan kondisi.
- d. Kesesuaian organisasi, yaitu agar kontrol terpola untuk keperluan organisasi.
- e. Kontrol diri, disini dimaksudkan bahwa tiap unit dapat mengontrol unit itu sendiri, karena masing-masing unit mempunyai tujuan.
- f. Kontrol langsung, maksudnya setiap sistem kontrol harus didesain sedemikianrupa untuk memelihara kontak langsung antara pengontrol dengan yang dikontrol.
- g. Faktor manusia, maksudnya adalah setiap pelaksanaan pengontrolan akan menyangkut orang, sedangkan orang punya faktor psikologis yang kadang-kadang menyebabkan gagalnya sistem, sehingga dalam hal ini kontrol erat kaitannya dengan fungsi komunikasi.

5. Penertiban

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan

utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dimana masyarakat bias menjalani kehidupan secara wajar. Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes (1981;06) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto (2001;78) yaitu:

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. Kerjasama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hirarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan kepatuhan
- n. Sesuai dengan pola
- o. Tersusun.

Ketertiban saling berkaitan dngan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama atau serentak dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendiri akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah

sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan (Soejito, 1984;169).

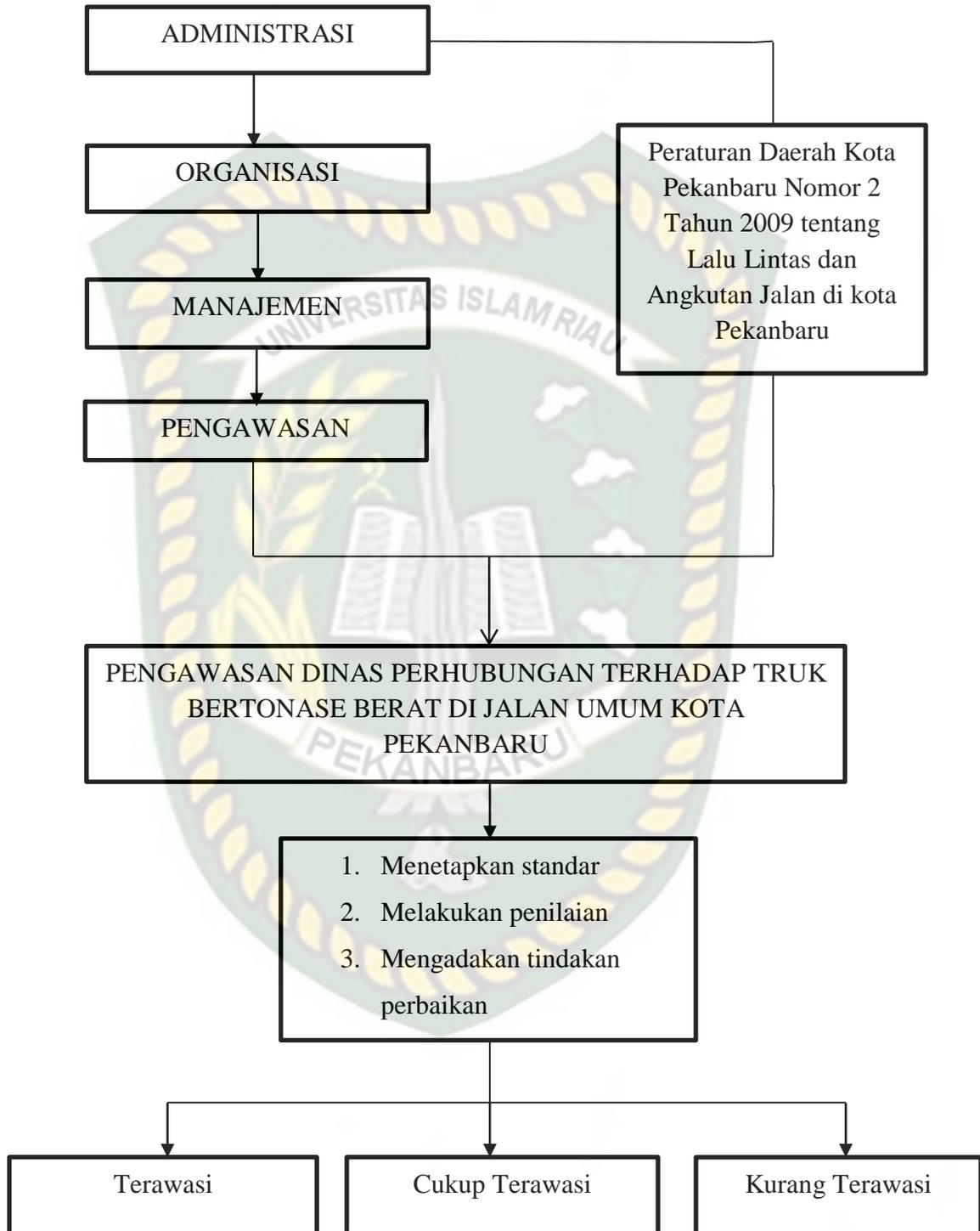
Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik phisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan (Djamin, 1984;14)

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga kalau tidak ada keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersamaan atau serentak.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah di uraikan dalam studi kepustakaan, maka penukis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.1 kerangka pikir Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.



C. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan dan telaah pustaka yang telah dilakukan maka diperoleh sebuah hipotesis yaitu: Di duga Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

D. Konsep Operasional

Pada penelitian ini penulis menjelaskan konsep-konsep operasional yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan maksud agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami konsep-konsep yang akan diteliti.

1. Penetapan Standar Kerja adalah hal-hal yang berhubungan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan kegiatan meliputi; melakukan sosialisasi/ penyuluhan peraturan, mengadakan pos pengawasan, identifikasi kewajiban pengguna jalan umum untuk angkutan muatan barang (truk).
2. Mengadakan Penilaian atau Mengukur Hasil adalah pemeriksaan pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan pemeriksaan kewajiban penggunaan jalan umum muatan barang (Truk) di jalan umum Kota Pekanbaru.
3. Tindakan perbaikan adalah suatu upaya dalam hal memperbaiki permasalahan yang terjadi setelah diamati dengan memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

4. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau Tim Pengawas Terpadu dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
5. Kendaraan Bertonase Berat (Truk) adalah kendaraan yang memiliki daya tampung barang/ muatan di atas 5 ton.
6. Muatan Lebih adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas (Perda No.5 tahun 2013).
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum (Perda No.5 tahun 2013).
9. Pengaturan Penggunaan Jalan adalah melakukan pengaturan pengguna jalan yang di perbolehkan diangkut di jalan umum dengan ketentuan Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan dan kendaraan, membuat tempat penampungan pembongkaran muatan dan pengaturan pembongkaran, (Perda No.5 tahun 2013 Pasal 4).

E. Operasional Variabel

Dalam mewujudkan sebuah penelitian yang baik, maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan dari konsep penelitian dan juga untuk

mempermudah penampilan hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep yang telah di ukur yaitu:

Table II.1 Konsep Operasional Variabel Pengawasan Dinas Perhubungan Kota terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Menurut Brantas (2009;1997) Pengawasan adalah proses pemantauan penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah di tetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.	Pengawasan	1. Menetapkan standar	a. Melakukan sosialisasi/ penyuluhan peraturan	Terawasi
			b. Mengadakan pos pengawasan	Cukup terawasi
			c. Mengidentifikasi kewajiban pengguna jalan umum untuk angkutan muatan barang (truk).	Kurang terawasi
		2. Melakukan penilaian	a. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengawasan pengguna jalan umum untuk muatan barang (Truk).	Terawasi
				Cukup terawasi
				Kurang terawasi
		3. Mengadakan tindakan perbaikan	a. Mengethui penyimpangan yang terjadi.	Terawasi
			b. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi.	Cukup terawasi
				Kurang terawasi

F. Teknik Pengukuran

Setelah di kemukakan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu konsep pengawasan dengan tiga indikator variabel diatas, maka penulis menetapkan terknik pengukuran terhadap variabel penelitian tersebut dengan membagi kedalam tiga ukuran atau kategori penilaian yaitu dengan kategori penilaian terawasi, cukup terawasi, kurang terawasi.

Adapun pengukuran untuk variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- Terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $>67\%$
- Cukup terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah $34\%-66\%$
- Kurang terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah $<33\%$

Adapun pengukuran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar

- Terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $>67\%$

Cukup terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah <33%

2. Melakukan penilaian

Terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah >67%

Cukup terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah <33%

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah >67%

Cukup terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang terawasi : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah <33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian. Menurut Kountur (2005;105) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti. Kemudian melalui pendekatan kuantitatif (Sugiono, 2010:7) yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan tugas dalam pengawasan kendaraan betonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi, karena kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan perkembangan mobilitas transportasi yang paling tinggi dibanding kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Riau.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006;130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sopir pengendara truk bertonase berat dan masyarakat yang bermukim di sekitaran jalan yang biasa di lalui truk bertonase berat.

Menurut Iskandar (2005;69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representative atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati.

Tabel III.1 Sampel pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	1	1	100%
2.	Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	80	29	36%
3.	Sopir Truk Bertonase Berat	1.815	4	2,3%
4.	Masyarakat yang Berada Pada Jalan yang di Lalui Truk Bertonase Berat	~	3	-
Jumlah			37	

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan Teknik Sensus dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.
2. Untuk staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota pekanbaru di gunakan teknik penarikan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu dengan teknik pengambilan sampel karena ada pertimbangan tertentu.
3. Untuk sopir truk bertonase berat dan untuk masyarakat yang bermukim disekitar area yang sering dilalui truk bertonase berat digunakan teknik penarikan sampel *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau ditemukan secara tidak sengaja disekitar area yang dilalui truk bertonase berat.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan pengawasan dinas Perhubungan terhadap truk bertonase berat di jalan umum kota Pekanbaru, meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian yang meliputi permasalahan tentang bagaimana pengawasan dinas perhubungan terhadap truk brtonase berat di jalan umum kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013, dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, meliputi:

- a. Wawancara, yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti dalam wawancara bebas namun tetap terikat dengan pokok-pokok masalah dan tujuan penelitian (wawancara bertahap/bebas terpimpin).

- b. Observasi, adalah merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, Hadi dalam (Sugiono, 2010:145). atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian.
- c. Kuesioner yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan Pengawasan Dinas perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru terhadap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi dalam Sugiono (2013;240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk gambar, tulisan, atau karya menumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006;235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul di olah dalam bentuk analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka tetapi di deskripsikan dengan menggunakan uraian kalimat yang jelas dan rinci.

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunaan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah

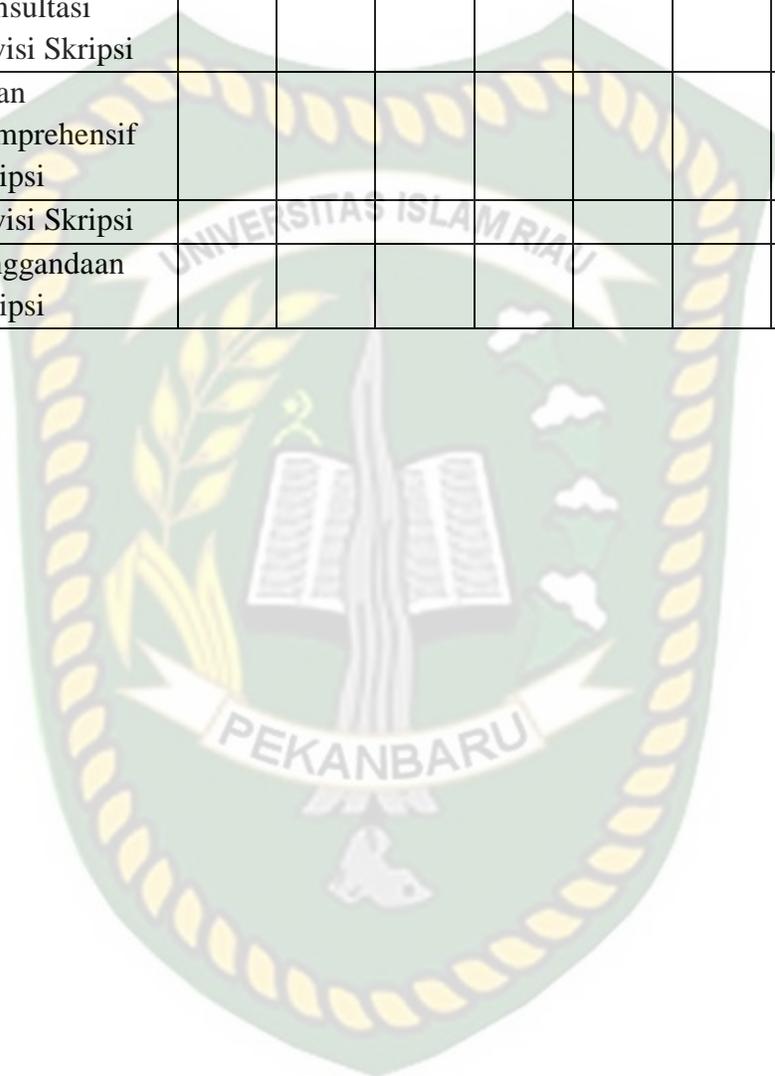
menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta di lapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

G. Jadwal Penelitian

Table III.2 Jadwal waktu penelitian tentang Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

No	Keterangan	Bulan ke..								
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan UP									
2	Seminar UP									
3	Revisi UP									
4	Revisi Kuisisioner									
5	Rekomendasi Survey									
6	Survey Lapangan									
7	Analisis Data									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian									
9	Konsultasi Revisi Skripsi									
10	Ujian Komprehensif Skripsi									
11	Revisi Skripsi									
12	Penggandaan Skripsi									



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Terletak pada titik koordinat $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ bujur timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Secara georafi, Kota Pekanbaru merupakan tergolong daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari aluvial dengan pasir dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa – rawa yang bersifat asam, sangat krosif untuk besi.

Ibu Kota Provinsi Riau Terletak di Kota Pekanbaru dan jarak Kota Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Pekanbaru – Taluk Kuantan | = 118 km |
| 2. Pekanbaru – Rengat | = 159 km |
| 3. Pekanbaru – Plk. Kerinci | = 33,5 km |
| 4. Pekanbaru – Siak | = 74,5 km |
| 5. Pekanbaru – Bangkinang | = 51 km |
| 6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian | = 128 km |
| 7. Pekanbaru – Bagan | = 192 km |
| 8. Pekanbaru – Dumai | = 125 km |
| 9. Pekanbaru – Selat Panjang | = 141 km |

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan Kota – kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kota Kecamatan, berikut adalah daftar Kecamatan dan luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	59,81	138.304	130.758	269.062
2	Payung Sekaki	43,24	46.360	44.305	90.665
3	Bukit Raya	22,05	53.448	49.666	103.114
4	Marpoyan Damai	29,74	68.050	63.195	131.245
5	Tenayan Raya	171,27	81.777	76.742	158.519
6	Lima Puluh	4,04	20.627	20.810	41.437
7	Sail	3,26	10.728	10.751	21.437
8	Pekanbaru Kota	2,26	12.716	12.378	25.094
9	Sukajadi	3,76	23.531	23.833	47.364
10	Senapelan	6,65	18.141	18.407	36.548
11	Rumbai	128,85	35.349	32.174	67.523
12	Rumbai Pesisir	157,33	37.360	35.147	72.516
Jumlah		632,26	546.400	518.166	10.064.566

Sumber: Pekanbaru dalam Angka, Tahun 2016

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 269.062 sedangkan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Sail yaitu 21,479 letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang yang memperoleh manfaat dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara geografis terletak diantara:

1. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

2. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
3. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Siak.
4. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibukotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatasan dengan Negara tetangga, sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional. Karena kondisi tersebut memudahkan untuk berhasilnya penyelundupan dan perdagangan gelap mobil-mobil mewah ke daerah Riau.

Secara administrasi kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung terhadap kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahannya dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C-24,2°C sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis, di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Dibawah ini akan dipaparkan banyak penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2015.

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.782	50.967	106.749
2	5-9	47.106	42.907	90.013
3	10-14	43.553	40.616	84.169
4	15-19	48.825	50.516	99.341
5	20-24	61.867	60.589	122.456
6	25-29	49.632	47.202	96.834
7	30-34	44.537	43.748	88.385
8	35-39	42.821	40.166	82.987
9	40-44	36.684	33.584	70.268
10	45-49	30.073	26.199	56.272
11	50-54	15.714	14.430	30.144
12	55-59	15.714	14.430	30.144
13	60-64	9.311	8.106	17.417
14	65-69	5.691	5.711	11.402
15	70-74	3.398	3.772	7.170
16	75>	2.467	3.888	6.355

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru, 2015

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

2. Gambaran Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 sesuai dengan keputusan menteri perhubungan. Kantor dinas perhubungan

adalah sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi di sektor perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di perhubungan darat, laut dan udara tentunya mempunyai visi dan misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintah negara tersebut, yang mana visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

Visi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

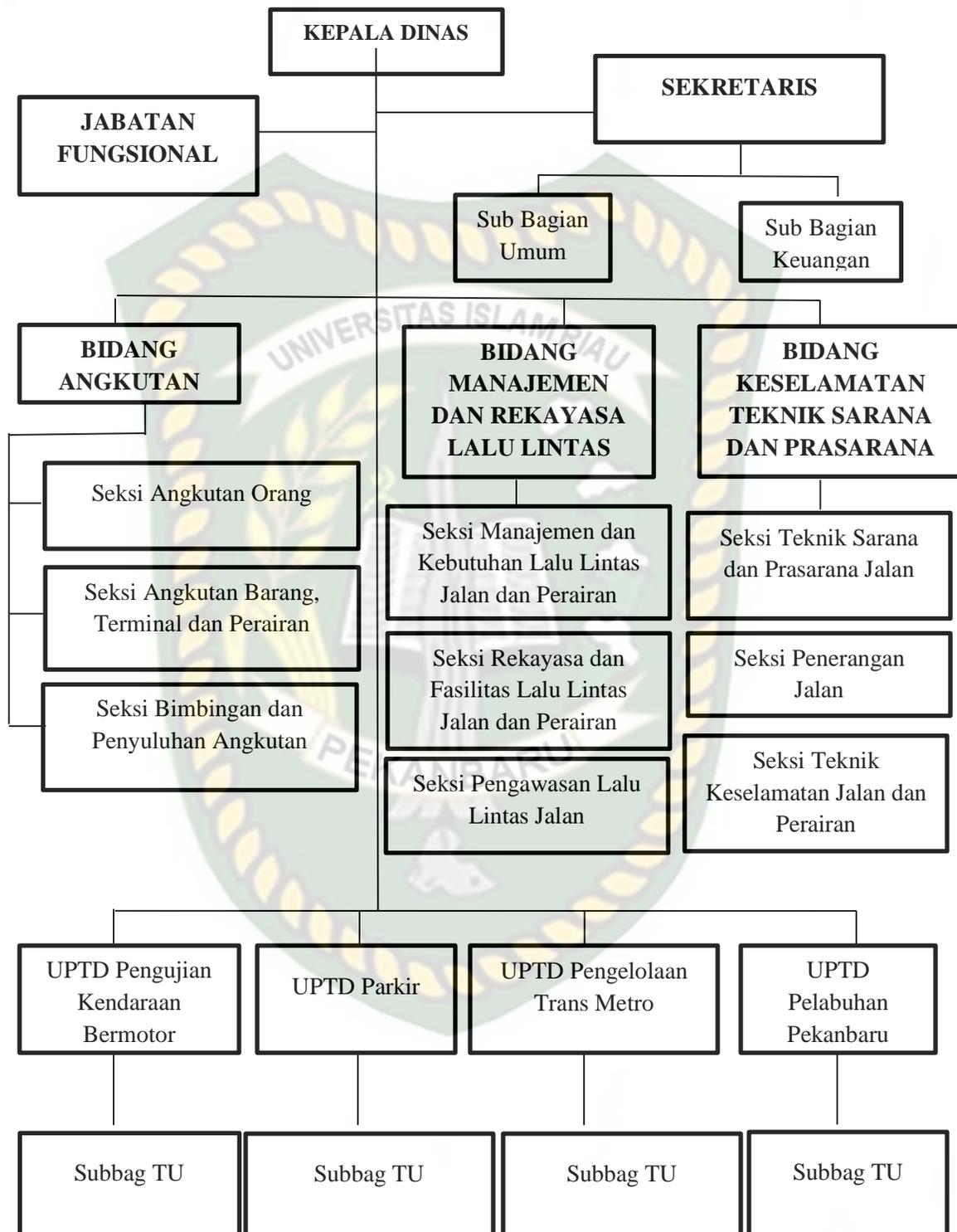
- Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap menyeluruh, handal dan terjangkau.

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

- Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas dan professional.
- Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- Mengusahakan ketersediaan dan kehandalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
- Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

B. Struktur Keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Tahun 2018.



Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris jendral.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Angkutan, membawahi:
 - a. Seksi Angkutan Orang
 - b. Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan
4. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahi:
 - a. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 - b. Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 - c. Seksi Pengawasan Lalu Lintas
5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - a. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
 - b. Seksi Penerangan Jalan
 - c. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

C. Fungsi dan Tugas Organisasi

Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas struktur organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari tiap-tiap bidang maupun tiap-tiap seksi pekerjaan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota pekanbaru, yaitu terdiri dari:

1. Kepala Dinas

- a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Pengoordinasian yang diberikan oleh pemerintah.
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan perhubungan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasarana.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.

- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- e. Pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Umum
 - a. Perumusan dan pelaksanaan pengelelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan orasarana.
- h. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- j. Perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi PNS serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan dinas.
- l. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Keuangan
 - a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana kerja Tahunann (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan kinerja dinas.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
 - d. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yahg berhubungan dengan penyusunan program.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
 - f. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan pembayaran (SPP).
 - g. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - h. Pelaksanaan verifikasi laporan harian atas penerimaan.
 - i. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - j. Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.

- k. Penatausahaan asset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.
- l. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

3. Bidang Angkutan

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang angkutan.
- b. Pengordinasian, pembinaan dan perumusan program kerja tahunan bidang angkutan.
- c. Penggordinasian, pembinaan dan perumusan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan perizinan di bidang angkutan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidang angkutan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan ole pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri dari:

- Seksi Angkutan Orang:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil atau mudsh digunakan.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolsk ukur keberhasilan tugas.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang dperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan.
 - f. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin pengoperasian angkutan orang dengan kendaraan taksi.
 - g. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin pengperasian angkutan karyawan, sekolah dan mahasiswa.

- h. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota, perbatasan dan pedesaan serta angkutan lingkungan.
- i. Perumusan dan pelaksanaan perencanaan pelayanan angkutan orang.
- j. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan angkutan sewa dan pariwisata.
- k. Perumusan dan penetapan tariff angkutan taksi.
- l. Perumusan dan penyusunan usulan penetapan tarif angkutan kota dan perbatasan.
- m. Perumusan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi.
- n. Perumusan dan pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.
- o. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin perusahaan angkutan orang.
- p. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- q. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- r. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- s. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang dilaporkan, masalah yang

dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan ataupun tertulis.

- t. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
 - u. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksi angkutan orang.
 - v. Pembagian tugas kepada bawahan.
 - w. Memberi bimbingan, petunjuk dan pembinaan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan.
 - x. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya.
 - y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan telah

sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.

- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pengelolaan penyelenggaraan terminal.
- f. Penyiapan proses izin usaha perusahaan angkutan perairan.
- g. Pelaksanaan proses izin usaha pelayanan rakyat.
- h. Pelaksanaan proses izin usaha tally di pelabuhan.
- i. Pelaksanaan proses izin usaha ekspedisi/freight forwarder.
- j. Pelaksanaan proses izin usaha bongkar muat barang.
- k. Perumusan dan pelaksanaan perhitungan dalam penetapan tarif angkutan perairan.
- l. Perumusan dan pelaksanaan rekomendasi dan perizinan angkutan antar moda.
- m. Pengumpulan dan pengelolaan data angkutan perairan dan terminal.
- n. Penyiapan penetapan tariff jasa pelabuhan.
- o. Penyusunan standar pelayan minimal pengelolaan terminal dan angkutan antar moda.
- p. Perumusan penetapan terminal tipe C.

- q. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin perusahaan angkutan barang.
- r. Perumusan dan pelaksanaan perencanaan pelayanan angkutan barang.
- s. Perumusan dan pelaksanaan pemberian izin dispensasi angkutan alat berat, barang berbahaya dan peti kemas dalam kota.
- t. Perumusan menetapkan jaringan lintas dalam kota.
- u. Perumusan kebijakan angkutan tidak bermotor.
- v. Perumusan dan pelaksanaan perencanaan pelayanan angkutan barang.
- w. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- x. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- y. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasaan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- z. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijakan yang diambil guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan dan tulisan.
- aa. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- bb. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksi angkutan barang, terminal dan prairan.

cc. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan peyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - e. Pelaksanaan pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan umum.
 - f. Perencanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan kepada masyarakat.
 - g. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum.

- h. Pelaksanaan pembinaan pengusaha angkutan perairan.
- i. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi pengemudi.
- j. Pelaksanaan analisa terhadap kebijakan di bidang angkutan umum.
- k. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan di daerah serta analisa dan evaluasinya.
- l. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan sosial dan kampanye di bidang keselamatan angkutan.
- m. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- n. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- o. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- p. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan atau tertulis.
- q. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- r. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksi angkutan.

- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan setiap kegiatan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari:

- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Perairan

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat yang mudah diambil atau digunakan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Penyelenggaraan, pengoordinasian, mengevaluasi analisa dampak lalu lintas bangunan-bangunan yang terdampak.
- f. Pelaksanaan kajian yang mengevaluasi, kinerja pelayanan ruas jalan dan persimpangan serta penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- g. Perencanaan dan mengevaluasi manajemen pembatasan lalu lintas kendaraan.
- h. Pelaksanaan pembangunan dan penentuan lokasi, pengadaan baru, evaluasi kondisi Rambu Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Paku Jalan dan

Traffic Light, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan serta fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Jalan dan Perairan.

- i. Pelaksanaan survey-survey lalu lintas jalan dan persimpangan.
 - j. Perencanaan dan mengevaluasi arah lalu lintas, sirkulasi lalu lintas dan pengendalian pembebanan ruas jalan.
 - k. Perencanaan dan mengevaluasi manajemen penyelenggaraan parker diluar badan jalan dann kebutuhan lalu lintasnya.
 - l. Pemberian izin penyelenggaraan parker diluar badan jalan dan rekomendasi besaran tariff parkir.
 - m. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
 - n. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan denga seksinya.
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Rekayasa dan Fasilitasi Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat yang mudah diambil atau mudah digunakan.

- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan dan pengoordinasian rekayasa lalu lintas pada event-event tertentu (insidental).
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan traffic light, lampu jalan, RPPJ, kanstin, marka jalan, papan nama jalan, alat penegndali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan perlengkapan jalan dan perairan.
- g. Perencanaan dan mengevaluasi geometric jalan, U-Turn dan mulut persimpangan.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan perubahan waktu siklus persimpangan.
- i. Pelaksanaan evaluasi daerah rawan kemacetan.
- j. Penentuan lokasi, potensi, perhitungan tariff, larangan dan mengevaluasi parkir untuk umum di badan jalan dan kebutuhan lalu lintas lainnya.

- k. Penyelenggaraan, merancang dan mengevaluasi kawasan tertib berlalu lintas.
- l. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- m. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur

kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.

- e. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan.
- f. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran di bidang LLAJ.
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam kota.
- h. Pelaksanaan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- j. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas.
- k. Pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan bermotor.
- l. Pelaksanaan pemanduan kendaraan.
- m. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- n. Peumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang ini.

- b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan setiap kegiatan di bidang keselamatan teknik sarana dan prasarana.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidang keselamatan teknik dan prasarana.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan tugas-tugas keselamatan dan teknik sarana lalu lintas jalan, prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan, teknik sarana prasarana dan keselamatan lalu lintas perairan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.

- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan fasilitas pejalan kaki, terdiri dari trotoar, jembatan penyebrangan orang dan halte.
- f. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan terminal tipe C.
- g. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan gedung parkir.
- h. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan gedung PKB.
- i. Perencanaan, pengusulan, pelaksanaan dan perawatan pembangunan dermaga.

- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perbengkelan umum kendaraan bermotor.
- k. Penyusunan rencana kejadian anggaran seksi.
- l. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Penerangan Jalan
 - a. Perumusn dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
 - b. Perumusan dan pelaksanaann penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur

kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknik dan laporan di bidang tugasnya.

- e. Pelaksanaan analisa rencana pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU).
 - f. Pelaksanaan perencanaan pembangunan LPJU.
 - g. Pelaksanaan pembangunan LPJU.
 - h. Pelaksanaan perawatan daneliharaan LPJU.
 - i. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
 - j. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan
 - a. Perumusan dan pelaksanaan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja mudah diambil atau mudah digunakan.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan caramerinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.

- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan proses pemberian surat persetujuan berlayar untuk kapal ukuran di bawah GT.7 yang berlayar diperairan sungai dan danau.
- f. Pelaksanaan proses pemberian surat persetujuan berlayar dan atau olah gerak kapal untuk kapal yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau) di wilayah kota.
- g. Pelaksanaan proses penerbitan dokumen kapal, yaitu pas kapal, pengukuran kapal, sertifikat kapal, dan pemeriksaan permesinan dan perlengkapan kapal dibawah GT.7.
- h. Pembuatan laporan pengoperasian kapal di bawah GT.7 kepada kepala bidang.
- i. Pelaksanaan analisa daerah rawan kecelakaan (DRK) dan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan dan perairan dalam kota.
- j. Pelaksanaan kampanye keselamatan.
- k. Pelaksanaan sosialisasi, penetapan, pengawasan dan pembinaan sekolah mengemudi.

- l. Perencanaan dan pelaksanaan pembuatan zona selamat sekolah (ZSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) serta program kegiatan keselamatan lainnya.
- m. Pengawasan kegiatan di bawah permukaan air (salvage).
- n. Pemberian izin pengoperasian bangunan di tepi sungai dan danau.
- o. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- p. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya dinas perhubungan kota pekanbaru adalah organisasi pemerintah Negara yang didirikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dan bergerak dibidang perhubungan darat, laut dan udara. Adapun tugas pokok dari dinas perhubungan kota Pekanbaru yaitu adalah memberikan pelayanan dan penyedia jasa transportasi, pos dan alat komunikasi yang lengkap menyeluruh, handal dan terjangkau dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk bertonase berat di jalan umum kota Pekanbaru, peneliti mengambil data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 49 orang responden yang terdiri dari 1 orang Kepala bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 29 orang Staff Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 11 orang sopir truk bertonase berat dan 8 orang masyarakat yang berada pada jalan yang dilalui truk bertonase berat. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut:

1. Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, slain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang makan akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya

tahan dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilihat identitas responden tentang umurnya pada tabelk berikut ini:

Tabel V.1 Identitas Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Umur.

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	20-30 tahun	16	55%
2	31-40 tahun	12	41%
3	41-50 tahun	1	4%
4	>50 tahun	-	-
Jumlah		29	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat usia, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan umur responden 20-30 tahun berjumlah 16 orang atau 55%. Lalu umur responden pada 31-40 tahun berjumlah 12 orang atau 41%. Dan terakhir umur responden pada 41-50 berjumlah 1 orang atau 4% Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 20-30 tahun.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Identitas Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	23	79%
2	Perempuan	6	21%
	Jumlah	29	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden laki laki sebanyak 23 orang atau 79% dan jumlah responden perempuan berjumlah 6 orang atau 21 %. Hal ini menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki.

3. Tingkat Pendidikan

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Identitas Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	14	48%
4	Diploma	7	24%
5	Sarjana	8	28%
	Jumlah	29	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel V.3 diatas, dapat kita lihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden yakni sebanyak 14 orang atau 48% merupakan lulusan SLTA, kemudian sebanyak 7 orang atau setara 24% merupakan lulusan Diploma dan sebanyak 8 orang atau setara 28% merupakan lulusan Sarjana. Jadi tingkat responden yang paling banyak yaitu berada pada tingkat lulusan SLTA.

B. Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

Pengawasan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai, apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena:

- a. Dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan teori Brantas (2009) sebagai pedoman atau instrument penelitian yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan atau program meliputi proses-proses sebagai berikut, yaitu:

- 1) Menetapkan standar yang akan digunakan dalam pengawasan.
- 2) Menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- 3) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

1. Menetapkan Standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti.

Penetapan Standar adalah hal-hal yang berhubungan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan kegiatan meliputi; melakukan sosialisasi/ penyuluhan peraturan, mengadakan pos pengawasan, identifikasi kewajiban pengguna jalan umum untuk angkutan muatan barang (truk).

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang berjumlah 29 orang terhadap indikator Menetapkan Standar dapat dilihat pada tabel V.4.

Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Kejelasan peraturan yang mengatur larangan truk bertonase melintas di jalan umum.	28 (96%)	1 (4%)	-	29 (100%)
2	Sosialisasi terkait peraturan yang diberikan kepada pengendara tentang larangan melintas di jalan umum.	16 (55%)	13 (45%)	-	29 (100%)
3	Sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan.	23 (79%)	6 (21%)	-	29 (100%)
4	Mengidentifikasi kewajiban pengguna jalan umum.	20 (69%)	9 (31%)	-	29 (100%)
Jumlah		87	29	-	116
Rata-rata		22 (76%)	7 (24%)	-	29 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 29 orang responden. Pada item penilaian pertama mengenai Peraturan Yang Mengatur Larangan Truk Bertonase responden yang menjawab terawasi berjumlah 28 orang, yang menjawab cukup terawasi 1 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terawasi. Untuk item penilaian kedua mengenai Sosialisasi Kepada Pengendara Truk Bertonase Berat responden yang menjawab terawasi berjumlah 16 orang, yang menjawab cukup

terawasi berjumlah 13 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terawasi. Untuk item penilaian ketiga mengenai Sarana dan Prasarana Pengawasan responden yang menjawab terawasi berjumlah 23 orang, yang menjawab cukup terawasi sebanyak 6 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terawasi. Adapun pada item penilaian keempat mengenai Mengidentifikasi Kewajiban Pengguna Jalan responden yang menjawab terawasi berjumlah 20 orang, yang menjawab cukup terawasi berjumlah 9 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terawasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru tanggapan dari Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mengenai indikator Menetapkan Standar yaitu berada pada kategori “Terawasi”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mengenai indikator Menetapkan Standar dengan pertanyaan pertama, Apakah ada kejelasan peraturan dalam melakukan pengawasan? Dan pertanyaan kedua, dari manakah peraturan itu di terbitkan? Beliau menjawab:

“Pengaturan dan pengawasan penggunaan jalan di wilayah Kota Pekanbaru oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan tugas yang diberikan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, namun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat melakukan koordinasi dengan dibentuk tim terpadu sementara. Pengawasan kendaraan ataupun kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru sudah dilakukan sesuai dengan aturan perwako yang telah diterbitkan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Bidang Manajemen dan Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan yang juga berperan sebagai pihak yang mengatur rute-rute perjalanan kendaraan angkutan barang” (wawancara, Senin, 12 Agustus 2019, 10.00 WIB).

Pertanyaan ketiga, Apakah ada sosialisasi tentang peraturan berkendara yang diberikan pada pengendara truk? Dan pertanyaan keempat, Apakah ada sarana dan prasarana yang diberikan kepada petugas pengawasan dalam melakukan pengawasan.

Beliau menjawab:

“Pembinaan tersebut dilakukan dengan memberi pengarahan, baik secara tertulis maupun lisan pada saat pengguna kendaraan mengurus izin operasional atau uji berkala, oleh petugas diberi arahan tentang kewajiban mereka mengenai peraturan daerah terkait kewajiban pengguna kendaraan dalam menggunakan jalan umum di Kota Pekanbaru tersebut dan juga peraturan berkendara itu diberitaukan kepada pemilik usaha untuk memberi tau pengemudi agar kendaraannya tidak melewati rute-rute yang tidak diperbolehkan untuk melintas. Dalam melakukan pengawasan petugas diberikan sarana dan prasarana lengkap seperti mobil derek, pos pengawasan, rambu-rambu pengawasan dan segala bentuk peraturan pengawasan.” (wawancara, Senin, 12 Agustus 2019, 10.00 WIB).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sopir Pengendara Truk

Bertonase Berat mengenai indikator Menetapkan Standar beliau berkata:

“Kita mengetahui kewajiban penggunaan jalan, seperti menggunakan rantai pengaman atau terpal, dan melengkapi dokumen angkutan barang lainnya seperti berat muatan yang sudah ditimbang diperusahaan disertai dokumen, dan lainnya. Kewajiban tersebut kita ketahui pada saat mengurus kelayakan jalan kendaraan dari Dinas Perhubungan maupun perusahaan. Pertama kali kita melengkapi Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) yang kemudian kita diberi arahan atau pembinaan peraturan daerah dan kewajiban penggunaan jalan berdasarkan ketentuan peraturan” (Wawancara dengan Teddy Supir Truk, Rabu 7 Agustus 2019).

“Dalam rute jalan yang kita lalui telah diatur oleh Dinas Perhubungan, misalnya melalui pintu masuk Timur menuju Selatan kita harus melewati Pasir Putih masuk Garuda Sakti Menuju Siak atau jika ingin melalui simpang 4 lampu merah jalan HR. Soebrantas harus diatas jam 21.00-06.00 WIB” (Wawancara dengan Andri Supir Truk, Rabu 7 Agustus 2019).

Kemudian hasil dari wawancara bersama Masyarakat yang Berada Pada Jalan yang di Lalui Truk Bertonase Berat mengenai indikator Menetapkan Standar beliau menjawab:

“Memang sering dilakukan pengawasan oleh pihak pengawas yang mengatur jalan, tapi saya kurang tau seberapa rutinnnya pengawasan disini. Dan masih ada juga truk bertonase yang melintas di jalan yang dilarang sehingga menyebabkan kemacetan dan juga kerusakan jalan disini” (Wawancara Mila, Pedagang, Rabu 7 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa masih ada pegawai staff pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang tidak melukan penjagaan jalan sesuai dengan aturan yang di tetapkan yaitu seperti melakukan penjagaan tanpa rambu-rambu lalu lintas sebagai sarana dan prasaran yang telah di sediakan dan masih terdapat juga petugas yang tidak mengidentifikasi kewajiban-kewajiban pengendara yang harus dilengkapi. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru termasuk pada kategori “Cukup Terawasi”.

2. Melakukan Penilaian

Selanjutnya pengawasan terhadap truk bertonase berat di jalan umum dapat di ukur pada indikator: Melakukan Penilaian yang artinya adalah pemeriksaan pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan pemeriksaan kewajiban penggunaan jalan umum muatan barang (Truk) di jalan umum Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang berjumlah 29 orang mengenai indikator Melakukan Penilaian dapat dilihat pada tabel V.11.

Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Melakukan Penilaian Terhadap Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Ada melakukan penilaian terhadap operasional pengawasaan truk bertonase berat.	20 (69%)	7 (24%)	2 (7%)	29 (100%)
2	Ada dilakukakan upaya evaluasi terhadap hasil pengawasaan truk bertonase berat.	13 (45%)	14 (48%)	2 (7%)	29 (100%)
Jumlah		33	21	4	58
Rata-rata		17 (59%)	10 (34%)	2 (7%)	29 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019.

Berdasarkan dari tabel V.5 dapat dilihat bahwa terdapat 29 orang responden pada indikator melakukan penilaian. Pada item penilaian pertama mengenai Penilaian Terhadap Pengawasan Truk Bertonase responden yang menjawab terawasi berjumlah 20 orang, yang menjawab cukup terawasi berjumlah 7 dan yang menjawab kurang terawasi sebanyak 2 orang. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Upaya Evaluasi Terhadap Hasil Pengawasan responden yang menjawab terawasi berjumlah

sebanyak 13 orang, yang menjawab cukup terawasi berjumlah 14 orang dan yang menjawab kurang terawasi berjumlah 2 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru tanggapan dari Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mengenai indikator Melakukan Penilaian yaitu berada pada kategori “Kurang Terawasi”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mengenai indikator kedua Melakukan Penilaian dengan pertanyaan pertama, Apakah ada dilakukan evaluasi terhadap pengawasan? Beliau menjawab:

“Untuk angkutan barang belum ada, karna memang rata-rata pengusaha bukan hanya berasal dari dalam kota. Hanya saja pemantauan dari pos pengawasan sebagai kegiatan dalam mengevaluasi pengguna kendaraan angkutan barang untuk wajib mematuhi ketentuan mengenai daya angkut kendaraan, dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengguna kendaran untuk melewati jalan sesuai rute yang telah diatur” (Wawancara, Senin 12 Agustus 2019, 10.00 WIB).

Pertanyaan kedua, Apakah bentuk perbaikan yang dilakukan dalam pengawasan tersebut? Beliau menjawab:

“Dalam melaksanakan pengawasan kendaraan angkutan barang di jalan, kita belum bisa optimal karena kurangnya personel yang melakukan pengawasan di lapangan serta minimnya pos pengawasan yang hanya ada pada pintu area perbatasan, itupun dengan prasarana yang terbatas. Tindakan perbaikan yang harusnya dilakukan dalam pengawasan dengan membentuk tim terpadu di bidang lalu lintas jalan” (Wawancara, Senin 12 Agustus 2019, 10.00 WIB).

Untuk mengetahui hasil dari jawaban responden Sopir Pengendara Truk Bertonase Berat mengenai indikator kedua yaitu Melakukan Penilaian tentang bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap pengawasan beliau berkata:

“Pengawasan petugas kepada pengendara truk ini sering dilakukan tetapi ada saja yang melanggarnya. Saya sendiri pernah melakukan pelanggaran, hal tersebut disebabkan tidak adanya rambu-rambu larangan untuk melalui jalan tersebut pada waktu yang ditentukan, memang dari teman-teman lain sudah memberitahu bahwa tidak semua jalan dapat dilalui dan hanya dapat dilalui pada jam tertentu, tapi tidak adanya rambu larangan jalan membuat kita lalai/lupa apalagi bagi pengemudi kendaraan yang tidak berasal dari Kota Pekanbaru atau pengemudi baru hal tersebut dapat saja terjadi” (Wawancara dengan Andri Supir Truk, Rabu 7 Agustus 2019).

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari responden Masyarakat yang Berada Pada Jalan yang di Lalui Truk Bertonase Berat mengenai indikator Melakukan Penilaian tentang bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap pengawasan beliau menjawab:

“Mungkin ada baiknya jika pengawasan itu dilakukan dengan anggota yang lebih lengkap jadi bisa lancar dan bisa menyebar pengawasannya. Karna jika hanya dititik tertentu yang ada disini terawasi sementara disana banyak terjadi pelanggaran lainnya. Karna di jalan sudirman saja kadang terdapat truk angkutan barang yg melintas” (Wawancara Selamat, Pedagang, Rabu 7 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan tindakan penilaian dapat disimpulkan berada pada kategori “Kurang Terawasi” dikarenakan masih minimnya penilaian dan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Pekanbaru karena terbatasnya jumlah personel petugas pengawasan sehingga pengendara masih bisa melakukan pelanggaran.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Indikator terakhir dalam melakukan pengawasan terhadap truk bertonase berat di jalan umum adalah Mengadakan Tindakan Perbaikan yaitu suatu upaya dalam hal memperbaiki permasalahan yang terjadi setelah diamati dengan memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang berjumlah 29 orang mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dapat dilihat pada tabel V.12 berikut.

Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan Terhadap Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Pemberian sanksi bagi pengemudi truk yang melakukan pelanggaran.	23 (79%)	6 (21%)	-	29 (100%)
2	Jenis sanksi yang diberikan kepada truk bertonase berat yang melakukan pelanggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.	15 (52%)	10 (34%)	4 (14%)	29 (100%)
Jumlah		38	16	4	58
Rata-rata		19 (65%)	8 (28%)	2 (7%)	29 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019.

Berdasarkan dari tabel V.6 dapat dilihat bahwa terdapat 29 orang responden pada indikator mengadakan tindakan perbaikan. Pada item penilaian pertama mengenai Pemberian Sanksi Bagi Pengendara Truk Yang Melakukan Pelanggaran responden yang menjawab terawasi berjumlah 23 orang, yang menjawab cukup terawasi berjumlah 6 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang terawasi. Adapun pada item penilaian kedua mengenai Jenis Sanksi Yang Diberikan Apakah Sudah Sesuai Dengan Peraturan responden yang menjawab terawasi berjumlah 15 orang, yang menjawab cukup terawasi berjumlah 10 orang dan yang menjawab kurang terawasi berjumlah sebanyak 4 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru tanggapan dari Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berada pada kategori “Cukup Terawasi”.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Kenmarito sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dengan pertanyaan pertama, Apakah ada pemberian sanksi bagi pengendara truk yang melakukan pelanggaran? Beliau menjawab:

“Pasti ada, kita akan selalu melakukan tindakan tilang kepada kendaraan yang melintas tidak pada rutenya. Adapun pelanggaran pada lintasan yang dilarang, maka petugas dilapangan akan melakukan sanksi administrasi dan dapat juga tindakan langsung berupa pencabutan surat izin operasi jalan dengan harapan tidak terjadi pelanggaran yang sama apabila telah terjadi pelanggaran berulang” (Wawancara, Senin 12 Agustus 2019, 10.00 WIB).

Pertanyaan kedua, Apakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan? Beliau menjawab:

“Pelanggaran muatan yang dirinci dalam Perda Provinsi Riau tentang muatan lebih pada kendaraan truk, jika kelebihan muatan melebihi kompensasi muatan lebih angkutan barang maka akan dilakukan pembongkaran. Namun, dalam pelaksanaan tidak bisa kita terapkan dengan baik, karena tidak adanya lokasi atau tempat pembongkaran atau sarana pendukung lainnya seperti penetapan lokasi pembongkaran dan penimbang sebagai syarat sebelum melakukan pembongkaran pada kendaraan muatan lebih tersebut” (Wawancara, Senin 12 Agustus 2019, 10.00 WIB).

Untuk mengetahui hasil dari jawaban responden Sopir Pengendara Truk Bertonase Berat mengenai indikator ketiga yaitu Mengadakan Tindakan Perbaikan tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar beliau menjawab:

“Jika kita melanggar muatan kita ditilang dan membayar denda yang biasanya sih bisa diurus ditempat, jadi kita tetap bisa melanjutkan perjalanan. Kalau untuk pembongkaran barang tidak pernah dilakukan karena mungkin saja memang tidak ada timbangan untuk menimbang angkutan barang yang kita bawa. Makanya kita memuat kendaraan dengan muatan lebih dan juga kita melewati jalan tidak pada rutenya agar lebih pintas untuk menghemat waktu dan biaya yang penting ada kelengkapan surat kendaraan” (Wawancara dengan Husni Supir Truk, Rabu 7 Agustus 2019).

“Kita mengisi muatan hingga lebih dari kapasitas untuk menghemat waktu dan muatan yang akan diangkut. Selama ini aman-aman saja karena petugas jarang melakukan razia, kalau pun ada yang terkena razia bila kelebihan muatan bisa diurus ditempat asalkan dokumen atau surat-surat kendaraan lengkap” (Wawancara dengan Yulas Supir Truk, Jumat 9 Agustus 2019).

Kemudian hasil dari wawancara bersama Masyarakat yang Berada Pada Jalan yang di Lalui Truk Bertonase Berat mengenai indikator Menetapkan Standar beliau menjawab:

“Ada saja sopir yang kena sanksi, mereka ditilang oleh petugas. Sepertinya sanksi dan peraturan yang diberikan masih belum berat dan diremehkan oleh pengemudi sehingga mereka melakukan pelanggaran berulang” (Wawancara Alvian, Rabu 7 Agustus 2019).

Menurut hasil observasi peneliti dilapangan tentang indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dapat disimpulkan berada pada kategori “Kurang Terawasi” hal ini terlihat dari masih adanya truk truk yang tidak ditilang padahal sudah melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan terlihat belum sesuai dengan aturan sehingga masih diremehkan oleh para pelanggar terutama tidak tersedianya jembatan timbang untuk mendeteksi berat muatan truk yg melakukan pelanggaran.

Selanjutnya untuk mengukur pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel V.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mengenai Pengawasan Pada Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terawasi	Cukup Terawasi	Kurang Terawasi	
1	Menetapkan Standar	22 (76%)	7 (24%)	-	29 (100%)
2	Melakukan Penilaian	17 (59%)	10 (34%)	2 (7%)	29 (100%)
3	Mengadakan Tindakan Perbaikan	19 (65%)	8 (28%)	4 (7%)	29 (100%)
Jumlah		58	25	6	87 (100%)
Rata-rata		19 (65%)	8 (28%)	2 (7%)	29 (100%)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui secara keseluruhan indikator yang penulis ajukan kepada responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, responden yang menjawab terawasi sebanyak 19 orang atau setara 65%, responden yang menjawab cukup terawasi sebanyak 8 orang atau setara 28% dan yang menjawab kurang terawasi sebanyak 2 orang atau setara 7%. Sesuai dengan teknik pengukuran penelitian maka dari keseluruhan untuk rekapitulasi tanggapan responden Staff Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terdiri dari 3 indikator yang diajukan penulis maka Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup Terawasi” dengan jumlah persentase 65% .

Menurut observasi peneliti kategori penilaian tertinggi pada indikator menetapkan standar berada pada penilaian terawasi yang berjumlah 22 orang dikarenakan para pengawas lebih banyak merasa sudah melakukan penetapan standar sesuai pada ketentuan dalam melakukan pengawasan dan kategori terendah berada pada kategori kurang terawasi dikarenakan tidak adanya para perugas yang merasa tidak melakukan penetapan standar dalam melakukan kegiatan pengawasan. Selanjutnya kategori penilaian tertinggi pada indikator melakukan penilaian berada pada penilaian terawasi dikarenakan para petugas pengawasan sudah merasa cukup melakukan penilaian terhadap pengawasan kendaraan bertonase berat pada saat

melakukan pengawasan tersebut dan kategori penilaian terendah berada pada kategori kurang terawasi karena para petugas merasa sangat minimnya mereka melakukan pengawasan tanpa melakukan penilaian itu. Dan kategori penilaian tertinggi pada indikator melakukan tindakan perbaikan berada pada penilaian terawasi dikarenakan banyaknya petugas pengawasan yang merasa sudah melakukan tindakan perbaikan dalam melakukan pengawasan truk bertonase itu seperti sudah memberikan sanksi-sanksi yang tepat kepada para pelanggar peraturan dan kategori penilaian terendah berada pada penilaian kurang terawasi dikarenakan dalam setiap melakukan pengawasan dan mendapatkan pelanggaran para petugas sudah memberikan tindakan perbaikan berupa sanksi kepada para pelanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti juga dapat mengkategorikan kerapitulsati penelitian tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru sesuai skor teknik pengukuran yang berada pada angka 44%-66% yaitu berada pada kategori “Cukup Terawasi” dikarenakan tiap-tiap indikator pada penelitian belum terawasi dengan baik dilapangan tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan berhubungan dengan pengawasan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengawasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Pelaksana Pengawasan

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dilapangan belum memiliki jumlah petugas yang memadai dengan kebutuhan rute jalan yang menjadi target pengawasan. Selain itu, kualitas petugas jaga pada pos pengawasan belum melaksanakan pengawasan secara optimal. Dimana masih ditemukan pos pengawasan yang kosong, akibatnya masih ada kendaraan truk yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan jalan dan terpantau.

2. Sarana dan Prasarana Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa pendukung dengan ketersediaan sarana maupun prasarana pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum, sehingga keidealan personil dan fasilitas pendukungnya dengan beban pengawasan yang ada menjadi salah satu ukuran penting yang dilakukan selama ini. Keterbatasan pos pengawasan, tidak adanya terminal barang / lokasi pembongkaran muatan menambah sulit pelaksana pengawasan dalam memberikan tindakan perbaikan (sanksi) yang lebih tegas. Belum adanya lokasi-lokas tempat

barang dan alat berat bongkar muat, akibatnya apabila terdapat pelanggaran muatan lebih akan sangat sulit untuk menurunkan sebagian muatan dan akan dapat mengganggu lalu lintas pengguna jalan lainnya karena tidak adanya lokasi pembongkaran.

3. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas Kota Pekanbaru dilakukan ketika akan operasi razia kendaraan angkutan truk angkutan barang. Pengawasan dengan upaya membentuk tim terpadu hanya dilaksanakan pada waktu tertentu atau dengan kata lain pelaksanaan melalui fungsi koordinasi antar instansi di bidang lalu lintas (tim terpadu) belum terlaksana dengan optimal di jalan umum Kota Pekanbaru.

Koordinasi dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas Kota Pekanbaru dilakukan pada saat adanya operasi khusus / razia kendaraan angkutan dengan jadwal yang bersifat mendadak dan tidak dapat dipastikan. Selain operasi khusus / razia tidak terdapat bentuk koordinasi yang terkait, dimana sifat koordinasi hanya didasarkan pada kesadaran petugas lapangan dari instansi terkait.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru, maka disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru belum terawasi dengan optimal.
2. Sesuai pada indikator pertama yaitu Menetapkan Standar maka berada pada kategori penilaian **“Terawasi”** karena para petugas sudah melakukan pengawasan sesuai dengan standar peraturan.
3. Adapun indikator kedua yaitu Melakukan Penilaian berada pada kategori penilaian **“Kurang Terawasi”** dikarenakan belum mencapai hasil yang diharapkan seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan (truk) yang melakukan pelanggaran rute jalan.
4. Dan indikator ketiga yaitu Mengadakan Tindakan Perbaikan berada pada kategori penilaian **“Cukup Terawasi”** karena sanksi yang diberikan pada pelanggar belum dapat membuat jera pengendara untuk melakukan pelanggaran.

5. Pada keseluruhan rekapitulasi terhadap penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup Terawasi”.
6. Faktor yang mempengaruhi pengawasan truk bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru adalah kemampuan dan sikap pelaksana pengawas, belum memadainya pos pengawasan, belum tersedianya lokasi / tempat pembongkaran yang ideal di Kota Pekanbaru, minimnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait lainnya dalam bidang lalu lintas jalan, seperti Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pelatihan dan diklat bagi petugas lapangan, dalam membentuk sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Perlunya ketersediaan perlengkapan alat berat bongkar muatan dan sistem komputerisasi seperti; cctv yang terhubung dengan kantor bagian pengawasan dan pos pengawasan.
3. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan menjalankan fungsi koordinasi yang intens dengan setiap anggota dan antar instansi terkait di bidang angkutan dan lalu lintas jalan (Satlantas Kota Pekanbaru), untuk pembantuan pengawasan dalam menerima informasi atau lainnya pelanggaran kewajiban pengguna kendaraan barang (truk).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Gitosudarmo. 2000. *Prilaku Keorganisasian*. Yogyakarta, BPFE.
- Gomes, Cardoso, Faustino. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta, BPFE.
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta, Gaung Persada Press.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung, Alfabeta.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- Sarwoto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Andi.
- Setiawan, Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Jembatan.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.

- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung, Sinar Baru Algesindo.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta, PT Pustaka Quantum.
- Syamsu, Ibnu. 2000. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta.
- Terry R, George. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Usman, H. 2008. *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Winardi. 2000. *Azas-Azas Manajemen Modern*. Bandung, Swamitra Gros.
- Zulkifli, Morris. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.

B. Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.